

penyesatan dokumen, maupun kecacatan dokumen. Restorasi berarti mengumpulkan sebanyak-banyaknya data atau sumber tertulis yang dibutuhkan dan dihasilkan selama pencarian. Pada tahap selanjutnya, restorasi teks dilakukan dengan membandingkan satu sama lain dari teks atau data yang berhasil diperoleh. Kontrol melalui restorasi teks diberlakukan terutama untuk menguji dokumen- dokumen dari tulisan- tulisan tokoh dan aktifis PMII. Kemudian peneliti membandingkan dokumen satu dengan dokumen lainnya dalam satu tema berdasarkan kebutuhan data penelitian. Dari perbandingan ini, peneliti mendapatkan data sesungguhnya yang benar- benar terhindar dari kecacatan maupun pemalsuan dan penyesatan karya tulis.

Sedangkan kritik intern dilakukan dengan dua teknik. *Pertama*, dengan cara membaca data yang diperoleh secara berulang- ulang hingga peneliti merasa menemukan konsistensi antar data. Konsistensi ini ditandai dengan munculnya satu pemahaman, bahwa data yang digali dari berbagai dokumen telah diyakini memiliki satu pandangan atau kesimpulan yang sama. *Kedua*, dengan cara melakukan diskusi secara mendalam dengan akademisi yang kompeten dalam hal yang berkaitan dengan pembahasan. Misalnya dilakukan dengan diskusi dengan para kader PMII yang sedang melakukan kajian rutin ataupun dalam forum seminar yang berkaitan dengan tema.

Secara Praktis, teknik analisa data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut; *pertama*, data-data yang diperoleh dikategorisasi melalui pencatatan data yang digunakan peneliti dalam upaya mempermudah kategori data berdasarkan pada fokus penelitian. Setelah kategorisasi data dilakukan, teknik analisa data dilanjutkan dengan membuat narasi dan menguraikannya secara deskriptif pada penarikan nilai- nilai multikultural yang ada dalam kaderisasi PMII. *Kedua*, setelah deskripsi data dilakukan, selanjutnya analisa diarahkan pada interpretasi dan pembacaan secara kritis terhadap data yang sebelumnya telah dideskripsikan. Ini dilakukan guna menghasilkan temuan-temuan penelitian berdasarkan fokus yang telah ditetapkan sebelumnya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam usaha menyusun sebuah penelitian skripsi yang utuh dan senantiasa memiliki keterkaitan pada tiap bahasan bab-nya, maka kiranya perlu disusun terlebih dulu sistematika pembahasan dalam skripsi yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan mendeskripsikan secara umum dan menyeluruh tentang penelitian yang akan dilakukan yang berisikan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Sedangkan dalam *Bab kedua*, penulis akan memaparkan tinjauan umum atau kerangka teori tentang judul penelitian. Dalam bab kedua ini akan mengulas tentang pendidikan Islam dan wawasan multikultural.

Selanjutnya *Bab ketiga*, penulis akan menjelaskan tentang paparan hasil penelitian. Dalam bab ini penulis akan membahas data- data hasil penelitian yang terkait dengan nilai- nilai multikultural yang ada dalam sistem kaderisasi PMII. Pembahasan ini secara lebih detail menjelaskan tentang keorganisasian PMII, sistem kaderisasi yang dilaksanakan PMII serta materi yang disampaikan dan dikembangkan oleh PMII.

Kemudian dalam *Bab keempat*, penulis akan membahas dan menganalisa tentang nilai- nilai multikultural yang ada dan dikembangkan oleh PMII apakah relevan dengan pendidikan Islam berwawasan multikultural.

Yang terakhir *Bab kelima*, penulis akan memberikan kesimpulan terhadap rumusan masalah yang sudah dipaparkan di bab pertama serta memberikan saran terhadap sesuatu yang dikira penting untuk diperhatikan.

yang sama (Tuhan). Perbedaan hanyalah unsur untuk memperkuat persatuan. Pendidikan Islam adalah suatu upaya untuk membebaskan manusia dari belenggu nafsu dunia menuju pada nilai tauhid yang bersih dan mulia. Manusia, dengan pendidikan, diharapkan bisa terbebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan, kejumudan dan nafsu kebinatangannya.

Keempat, prinsip kontinuitas dan berkelanjutan (*istiqomah*). Dari prinsip inilah dikenal konsep pendidikan seumur hidup (*long life education*). Di dalam Islam, belajar adalah satu kewajiban yang tidak pernah dan tidak boleh berakhir. Seruan membaca yang ada dalam Al-Qur'an merupakan perintah yang tidak mengenal batas waktu. Dengan menuntut ilmu secara kontinyu dan terus-menerus, diharapkan akan muncul kesadaran pada diri manusia akan diri dan lingkungannya, dan yang lebih penting tentu saja adalah kesadaran akan tuhaninya.

Kelima, prinsip kemaslahatan dan keutamaan. Jika ruh tauhid telah berkembang dalam sistem moral dan ahlak seseorang dengan kebersihan hati dan kepercayaan yang jauh dari kotoran maka ia akan memiliki daya juang untuk membela hal-hal yang maslahat atau berguna bagi kehidupan. Sebab, nilai tauhid hanya bisa dirasakan apabila ia telah dimanifestasikan dalam gerak langkah manusia untuk kemaslahatan dan keutamaan manusia itu sendiri.

dan daya rekat nasionalisme dalam tatanan struktur dan kultur kehidupan bangsa Indonesia semakin mantap ketika kemerdekaan Indonesia tercapai pada 17 agustus 1945.

Makna kesatuan dalam keragaman yang mengakar secara kuat dalam kehidupan bangsa Indonesia semakin mendapatkan momentum historisnya ketika pancasila diterima sebagai dasar falsafah negara oleh tokoh-tokoh yang mewakili berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Sejak itu landasan filosofis dan ideologis menjadi daya perekat persatuan dan kesatuan bangsa yang telah diletakkan sedemikian rupa untuk membina dan mengembangkan integritas nasional ke masa depan.

Kekayaan akan keanekaragaman; agama, etnik dan kebudayaan yang ada di Indonesia ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi kekayaan ini merupakan khazanah yang dapat dipelihara dan memberikan nuansa dan dinamika bagi bangsa. Namun demikian, keanekaragaman itu juga dapat mengancam tatanan kehidupan masyarakat.

Akhir- akhir ini potret buram perdamaian Indonesia: mulai dari konflik etnis hingga terorisme yang terjadi akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Kerusuhan berbau SARA yang merebak di banyak tempat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti di wilayah Ambon, Poso, Sampit dan sebagainya, merupakan bagian dari adanya kesalahpahaman. Dari banyak studi yang dilakukan, salah satu

tercantum dalam dasar negara akan menjadi terwujud. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia akan menjadi inspirasi dan potensi bagi pembangunan bangsa sehingga cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat tercapai.

Mengingat pentingnya pemahaman mengenai multikulturalisme dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi negara-negara yang mempunyai aneka ragam budaya masyarakat seperti Indonesia, maka pendidikan yang mempunyai wawasan multikultural ini perlu dikembangkan. Melalui pendidikan multikultural ini diharapkan akan dicapai suatu kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam undang-undang dasar.

Secara filosofis sistem pendidikan nasional merupakan keniscayaan dari sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Artinya bahwa sistem pendidikan nasional bertolak dari dan bermuara pada konsepsi sistemik kehidupan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berjiwa persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Secara substantif-edukatif pendidikan nasional harus ditujukan untuk menghasilkan manusia dewasa Indonesia yang beriman dan

bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sebagaimana tertuang dan tergariskan dalam tujuan pendidikan nasional.

Secara praxis-pedagogis, sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila itu harus diwujudkan sebagai proses belajar anak dan orang dewasa sepanjang hayat melalui proses belajar yang bersifat konsentris tentang Pancasila, belajar melalui proses yang mencerminkan jiwa dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan belajar untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang religius, beradab, bersatu, demokratis dan berkeadilan.

BAB III

MENGENAL PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

A. PMII Dalam Lintasan Sejarah

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (selanjutnya disingkat PMII) adalah anak cucu Nahdlatul Ulama (NU).¹ Bermula dari keadaan NU sebagai partai politik yang pada tahun 1955 telah menjadikannya partai Islam terbesar setelah Masyumi. Keadaan itu menuntut kemandirian dalam segala aspek yang mendukung organisasi. Sementara itu para generasi muda NU yang sudah duduk di bangku perguruan tinggi kian bertambah banyak dan membutuhkan penanganan secara khusus.

Ide besar berdirinya PMII tidak dapat dipisahkan dari eksistensi IPNU-IPPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama-Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama). Secara kesejarahan, PMII merupakan matarantai dari Departemen Perguruan Tinggi IPNU yang dibentuk pada Muktamar III IPNU di Cirebon pada tanggal 27-31 Desember 1958 dalam rangka menampung aspirasi mahasiswa dari kalangan Nahdliyin. Namun mahasiswa Nahdliyin (sebutan bagi jamaah dan masyarakat NU) merasa bahwa Departemen Perguruan Tinggi IPNU-IPPNU tidak mampu menampung aspirasi di kalangan mahasiswa dan dunia kampus.

¹ Effendy Choirie, Choirul Anam, "Pemikiran PMII Dalam Berbagai Visi dan Persepsi", *Majalah Nahdlatul Ulama Aula*, Vol 3, 1991, vi.

Upaya yang dilakukan IPNU dengan membentuk Departemen Perguruan Tinggi tidak banyak memberi arti bagi perkembangan mahasiswa nahdliyin pada waktu itu. Hal itu disebabkan karena kondisi obyektif menunjukkan bahwa mahasiswa sangat berbeda dengan siswa dalam hal keinginan, dinamika, dan perilaku. Kenyataan bahwa gerak Departemen Perguruan Tinggi IPNU sangat terbatas. Untuk dapat duduk dalam anggota PPMI (Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia) dan MMI (Majlis Mahasiswa Indonesia), departemen tersebut tidaklah mungkin bisa.

Selain itu, kondisi perpolitikan saat itu juga mendukung keputusan untuk mendirikan wadah khusus mahasiswa. Kondisi politik saat itu yang dianggap mendorong terbentuknya wadah tersebut adalah:

1. Wadah Departemen Perguruan Tinggi IPNU dianggap tidak lagi memadai untuk sebuah gerakan mahasiswa.
2. Satu-satunya wadah kemahasiswaan Islam yang ada pada saat itu (HMI) tokoh-tokohnya dinilai terlalu dekat dengan Partai Masyumi, sedangkan tokoh Partai Masyumi telah melibatkan diri dalam PRRI.
3. Di internal NU, sebagai sebuah partai besar, seringkali harus memberikan jabatan dan kedudukan eksekutif kepada orang-orang di luar NU, karena anggapan lemahnya SDM. Dibutuhkan manuver untuk meyakinkan semua pihak yang berkepentingan, bahwa di lingkungan NU sudah banyak generasi muda yang berpendidikan di perguruan tinggi.

menekankan hendaknya organisasi yang akan dibentuk itu benar-benar dapat diandalkan sebagai kader partai NU dan menjadi mahasiswa yang berprinsip ilmu untuk diamalakan bagi kepentingan rakyat, bukan ilmu untuk ilmu.

Selanjutnya diadakan musyawarah mahasiswa nahdliyin di gedung Madrasah Muallimin Wonokromo Surabaya (YPP Khadijah sekarang/sekretariat PC PMII Surabaya sekarang) pada tanggal 14 – 16 April 1960 yang menghasilkan keputusan :

1. Berdirinya organisasi nahdliyin, dan organisasi tersebut diberi nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
2. Penyusunan peraturan dasar PMII yang dalam mukodimahnya jelas dinyatakan bahwa PMII merupakan kelanjutan dari departemen perguruan tinggi IPNU – IPPNU.
3. Persidangan dalam musyawarah mahasiswa nahdliyin itu dimulai tanggal 14 – 16 April 1960, sedangkan peraturan dasar PMII dinyatakan berlaku mulai 17 April 1960 atau bertepatan pada tanggal 21 Syawal 1379 H. Sehingga PMII dinyatakan berdiri pada tanggal 17 April 1960.
4. Memutuskan membentuk tiga orang formatur yaitu H. Mahbub Junaidi sebagai ketua umum, A.Cholid Mawardi sebagai ketua I, dan M.Said Budairy sebagai sekretaris umum PB PMII.

Susunan pengurus pusat PMII periode pertama ini baru tersusun secara lengkap pada bulan Mei 1960.

panitia kecil yang diketuai oleh M. Said Budairy dan Fahrurrozi AH untuk membuat anggaran rumah tangga PMII. Dalam sidang pleno II PB PMII yang diselenggarakan pada tanggal 8 – 9 September 1960 peraturan rumah tangga PMII dinyatakan sah berlaku. Pada sidang itu pula disahkan lambang PMII dan pokok pokok aturan mengenai anggota baru.

Lambang tersebut berupa perisai berwarna dasar biru muda di bagian bawah dan kuning muda di bagian atas dengan garis tepi berwarna biru tua dan tulisan balok PMII berwarna biru tua di bagian bawah perisai. Di bagian atas perisai terdapat lima buah bintang dengan ukuran sama kecuali bintang di tengah yang memiliki ukuran lebih besar. Di bagian bawah perisai terdapat empat buah bintang dengan ukuran sama dengan empat bintang lain di perisai bagian atas. Letak kesembilan bintang tersebut simetris dan seluruhnya berwarna putih. Lima bintang di bagian atas perisai menggambarkan rukun iman dan sekaligus menunjukkan Rasulullah bersama keempat Khulafaur Rasyidin. Empat bintang di perisai bagian bawah menunjukkan empat Madzhab Fiqh dalam tradisi ahlu sunnah wal jama'ah. Keseluruhan bintang berjumlah sembilan menunjukkan dewan ulama waliyullah pembawa Islam di Nusantara. Bentuk perisai menunjukkan Islam sebagai ajaran Islam sebagai benteng bagi kader pergerakan. Warna putih mewakili kebenaran ajaran Islam, warna kuning mewakili semangat kepemudaan yang dimiliki kader, warna biru muda menunjukkan cita-cita untuk dapat memiliki wawasan seluas

Untuk mempertegas deklarasi interdependensi PMII-NU melalui musyawarah nasional PB PMII tanggal 24 Desember 1991 di Cimacan Jawa Barat, PB PMII mengeluarkan keputusan tentang implementasi interdependensi PMII-NU. Penegasan hubungan itu didasarkan pemikiran – pemikiran antara lain : dalam pandangan PMII, ulama adalah pewaris kenabian. Ulama merupakan panutan karena kedalamannya dalam pemahaman keagamaan. Oleh karena itu, interdependensi PMII-NU ditempatkan dalam konteks keteladanan ulama dalam kehidupan bermasyarakat, kebangsaan dan bernegara.

Adanya persamaan paham keagamaan antara PMII dan NU. Keduanya sama-sama mengembangkan wawasan keislaman dengan paradigma pemahaman *Ahlussunah Wal Jama'ah*. Implikasi dari wawasan keagamaan itu tampak pula pada persamaan sikap sosial yang bercirikan *tawasuth, tasamuh, tawazun, I'tidal* dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Demikian juga didalam pola pikir, pola sikap, serta pola tindak PMII dan NU menganut pola selektif, akomodatif dan integrative sesuai prinsip dasar *Al-Muhafadhotu 'Ala Qodimis Sholih wal 'Ahdu bil Jadidil Aslah*.

Bagi PMII dan NU keutuhan komitmen keislaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan kebangsaan bagi setiap insan muslim Indonesia, atas dasar tersebut maka menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara Indonesia.

dan mewujudkan itu, Pergerakan telah memiliki *Ahlussunnah wal jama'ah* sebagai metode pemahaman dan penghayatan keyakinan itu.

2. Hubungan Manusia Dengan Allah

Allah adalah Pencipta segala sesuatu. Dia menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik kejadian dan menganugerahkan kedudukan terhormat kepada manusia di hadapan ciptaan-Nya yang lain.

Kedudukan seperti itu ditandai dengan pemberian daya fikir, kemampuan berkreasi dan kesadaran moral. Potensi itulah yang memungkinkan manusia memerankan fungsi sebagai khalifah dan hamba Allah. Dalam kehidupan sebagai khalifah, manusia memberanikan diri untuk mengemban amanat berat yang oleh Allah ditawarkan kepada makhluk-Nya. Sebagai hamba Allah, manusia harus melaksanakan ketentuan-ketentuan-Nya. Untuk itu, manusia dilengkapi dengan kesadaran moral yang selalu harus dirawat, jika manusia tidak ingin terjatuh ke dalam kedudukan yang rendah.

Dengan demikian, dalam kehidupan manusia sebagai ciptaan Allah, terdapat dua pola hubungan manusia dengan Allah, yaitu pola yang didasarkan pada kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dan sebagai hamba Allah. Kedua pola ini dijalani secara seimbang, lurus dan teguh, dengan tidak menjalani yang satu sambil mengabaikan yang

lain. Sebab memilih salah satu pola saja akan membawa manusia kepada kedudukan dan fungsi kemanusiaan yang tidak sempurna. Sebagai akibatnya manusia tidak akan dapat mengejawentahkan prinsip tauhid secara maksimal.

Pola hubungan dengan Allah juga harus dijalani dengan ikhlas, artinya pola ini dijalani dengan mengharapkan keridloan Allah. Sehingga pusat perhatian dalam menjalani dua pola ini adalah ikhtiar yang sungguh-sungguh. Sedangkan hasil optimal sepenuhnya kehendak Allah. Dengan demikian, berarti diberikan penekanan menjadi insan yang mengembangkan dua pola hubungan dengan Allah. Dengan menyadari arti niat dan ikhtiar, sehingga muncul manusia-manusia yang berkesadaran tinggi, kreatif dan dinamik dalam berhubungan dengan Allah, namun tetap taqwa dan tidak pongah Kepada Allah.

3. *Hubungan Manusia Dengan Manusia*

Hal ini lebih dikenal dengan istilah kata paham *humanism* atau yang dikenal dengan *hablum minannas*. Pemahaman ini merupakan sebuah nilai kodrati yang menjadi landasan dalam PMII. Kemanusiaan bersifat universal, global, di atas semua suku, ras, golongan dan agama. Nilai- nilai humanistik ini mengembalikan kepada keyakinan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan kerelaan dan kesepakatan untuk bekerja sama serta berdampingan setara dan saling pengertian. Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita bersama : hidup dalam kemajuan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Tolok ukur bernegara adalah keadilan, persamaan hukum dan perintah serta adanya permusyawaratan.

Sedangkan hubungan antara muslim dan non muslim dilakukan guna membina kehidupan manusia dengan tanpa mengorbankan keyakinan terhadap universalitas dan kebenaran Islam sebagai ajaran kehidupan paripurna. Dengan tetap berpegang pada keyakinan ini, dibina hubungan dan kerja sama secara damai dalam mencapai cita-cita kehidupan bersama ummat manusia.

4. Hubungan Manusia Dengan Alam

Sebagai ciptaan Allah, alam berkedudukan sederajat dengan manusia. Namun Allah menundukan alam bagi manusia , dan bukan sebaliknya . Jika sebaliknya yang terjadi, maka manusia akan terjebak dalam penghambaan terhadap alam , bukan penghambaan terhadap Allah. Karena itu sesungguhnya berkedudukan sebagai khalifah di bumi untuk menjadikan bumi maupun alam sebagai obyek dan wahana dalam bertauhid dan menegaskan dirinya.

Perlakuan manusia terhadap alam tersebut dimaksudkan untuk memakmurkan kehidupan di dunia dan diarahkan kepada kebaikan di akhirat, di sini berlaku upaya berkelanjutan untuk mentransendensikan segala aspek kehidupan manusia. Sebab akhirat adalah masa masa depan eskatologis yang tak terelakan . Kehidupan akhirat akan dicapai dengan sukses kalau kehidupan manusia benar-benar fungsional dan beramal shaleh.

Kearah semua itulah hubungan manusia dengan alam ditujukan . Dengan sendirinya cara-cara memanfaatkan alam , memakmurkan bumi dan menyelenggarakan kehidupan pada umumnya juga harus bersesuaian dengan tujuan yang terdapat dalam hubungan antara manusia dengan alam tersebut. Cara-cara tersebut dilakukan untuk mencukupi kebutuhan dasar dalam kehidupan bersama. Melalui pandangan ini haruslah dijamin kebutuhan manusia terhadap pekerjaan ,nafkah dan masa depan. Maka jelaslah hubungan manusia dengan alam merupakan hubungan pemanfaatan alam untuk kemakmuran bersama. Hidup bersama antar manusia berarti hidup dalam kerja sama, tolong menolong dan tenggang rasa.

Nilai Dasar Pergerakan ini dirumuskan kerangkanya oleh PMII pada Musyawarah Kerja Nasional II yang dilaksanakan pada tanggal

didik secara formal maupun nonformal dalam rangka menuju pendewasaan. Dengan kata lain pendidikan adalah segala aktifitas atau upaya sadar dan terencana yang dirancang untuk membantu seseorang mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup.

Sedangkan Kaderisasi yang ada dalam PMII berarti proses bertahap dan terus-menerus sesuai tingkatan, capaian, situasi dan kebutuhan tertentu, yang memungkinkan seorang kader dapat mengembangkan potensi akal, kemampuan fisik, moral dan sosialnya. Sehingga kader dapat membantu orang lain dan dirinya sendiri untuk memperbaiki keadaan sekarang dan mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Dari analisa ini dapat ditegaskan bahwa dasar dan pilar utama dalam mendirikan PMII yang kemudian diteruskan dengan bangunan sistem kaderisasi di dalamnya adalah semangat keislaman dan keindonesiaan. Semangat keislaman ini diejawantahkan dalam membunikan serta menjaga nilai-nilai ajaran Islam Ahlussunnah Waljama'ah.

Segala bentuk kaderisasi yang ada dalam PMII bermuara pada usaha untuk menghasilkan kader ideal yang dicitrakan dengan citra diri "Ulul Albab". Tanda-tanda Ulul Albab secara umum didefinisikan sebagai berikut. *Pertama*, sebagai seseorang yang selalu dan bersungguh-sungguh mencari ilmu pengetahuan (olah pikir). *Kedua*, seseorang mampu

realitas yang ada. Penempatan Aswaja sebagai *manhaj al-fikr* inilah yang menyebabkan adanya perbedaan antara kader NU yang aktif di PMII dengan yang tidak aktif.

Aswaja yang dijadikan *manhaj al-fikr* ini menyebabkan adanya gerakan progresif dari kader PMII dalam menanggapi setiap permasalahan yang ada. Ini sangat sesuai dengan Tri Dharma mahasiswa yang salah satu isinya adalah pengabdian kepada masyarakat. Dengan kata lain pemahaman Aswaja di PMII menjadi pijakan kekuatan yang mendongkrak kader PMII untuk cenderung melakukan aktifitas pergerakan dalam rangka mengontrol setiap realitas yang terbaca.

Jika menganalisa isi materi aswaja PMII maka yang dikaji adalah Aswaja NU itu sendiri. Walaupun PMII telah menjadi organisasi yang Independent terhadap NU sebagai mana yang tercantum dalam Deklarasi Murnajati. Namun demikian, dalam perjalanannya, PMII melakukan Deklarasi yang menyatakan sikap interdependensinya dengan NU. Sikap ini menegaskan bahwa PMII menyadari bahwa ikatan kultural dengan NU tetap tidak dapat dipisahkan.

Oleh karena itu, dalam melakukan analisa nilai Multikultural terhadap materi Ahlussunnah Waljama'ah yang diajarkan PMII sama dengan menganalisa Aswaja NU itu sendiri. Analisa ini adalah analisa konten / isi materi Ahlussunnah Waljama'ah yang ada dan diajarkan dan bukanlah analisa historis tentang kemunculan ajaran itu sendiri.

Ajaran Islam Ahlussunnah Waljama'ah adalah ajaran yang disampaikan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat-Nya.¹⁰ Paham Ahlussunnah Waljama'ah dalam NU yang juga dikembangkan oleh PMII mencakup aspek aqidah, syariah dan ahlak. Ketiganya, merupakan satu kesatuan ajaran yang mencakup seluruh aspek prinsip keagamaan Islam. Didasarkan pada *manhaj* / pola pemikiran Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bidang aqidah, empat imam madzhab besar dalam bidang fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali), dalam bidang tasawuf menganut *manhaj* Imam Al-Ghozali dan Imam Abu al-Qosim al-Junaidi al-Baghdadi.¹¹

Definisi yang dirumuskan (hasil penjabaran KH.Bisyri Mustafa) adalah sebagai berikut : satu, menganut ajaran-ajaran imam madzhab dari salah satu empat madzhab dalam bidang fiqh. Kedua, menganut ajaran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang tauhid. Ketiga, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qasim Al-Junaidy dan Ghazali dalam bidang tasawwuf.¹²

¹⁰ LTNU PWNU Jawa timur, *Aswaja An-Nahdliyah, Ajaran Ahlussunnah Waljama'ah yang berlaku di Lingkungan Nahdlatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2006), 2.

¹¹ Dalam karya Hadratussyaekh KH.Hasyim Asy'ari, "*Risalah Ahl al-Sunnah wal al-Jama'ah*" hal; 9. Beliau menyatakan: " Dalam bidang tasawuf sejalan (mengikuti) dengan Imam al-Ghazali dan al-Imam Abi al-Hasan al-Sadzili.

¹² Imam Ghazali M, *Aswaja Klaim Nahdlatul Ulama Pembakuan terhadap Kemapanan dalam Visi Anak Muda Nahdlatul 'Ulama* dalam Jurnal Kajian Keislaman Nuansa, Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, Kairo-mesir, dari <http://pcinumesir.tripod.com/ilmiah/jurnal/isjurnal/nuansa/Apr97/4.htm>, diakses tanggal 01 Mei 2012 Jam 03:05.

dan heterogenitas adalah sebuah keniscayaan ketika berada pada masyarakat sekarang ini. Dalam hal ini, pluralitas bukan hanya dipahami keragaman etnis dan suku, akan tetapi juga dipahami sebagai keragaman pemikiran, keragaman paradigma, keragaman paham, keragaman ekonomi, politik dan sebagainya. Sehingga tidak memberi kesempatan bagi masing-masing kelompok untuk mengklaim bahwa kelompoknya menjadi panutan bagi pihak lain. Dengan demikian, upaya pemaksaan tersebut tidak sejalan dengan nafas dan nilai pendidikan multikultural.

PMII dengan sendirinya harus menghargai dan menjunjung tinggi keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Penghormatan dan penghargaan seperti ini merupakan sikap yang sangat urgen untuk disosialisasikan. Sebab dengan kemajuan teknologi telekomunikasi, informasi dan transportasi telah melampaui batas-batas negara, sehingga tidak mungkin sebuah negara terisolasi dari pergaulan dunia. Dengan demikian, privileg and privasi yang hanya memperhatikan kelompok tertentu menjadi tidak relevan.

Pemahaman tentang Indonesia ini dalam kaderisasi yang ada di PMII menjadi materi wajib yang harus di ajarkan. Sejak tingkat pertama kaderisasi dimulai pengenalan terhadap sejarah Indonesia ditanamkan kuat kepada kader. Dengan pemahaman sejarah Indonesia ini harapannya para kader PMII mampu memahami dan benar- benar menerima keragaman

PMII, jika ada kader yang agak sedikit nakal juga tetap dirawat dan tetap diakui sebagai kader. Hal ini dilakukan karena PMII ingin menjadikan dirinya sebagai rumah bagi siapa saja yang ingin mengikuti proses kaderisasi dalam rangka menuju terbentuknya kader Ulul Albab yang dicita-citakannya.

Dilihat dari segi teritorial geografis ketersebaran kader, PMII juga sudah dapat memperlihatkan diterimanya dia oleh semua golongan di wilayah Indonesia. Ini dibuktikan dengan adanya kepengurusan cabang PMII di seluruh kota di Indonesia. Dalam artian, aktifitas dan pemahaman keorganisasian PMII dapat berlaku di semua level golongan masyarakat. Ini semua terwujud karena ajaran dan paham kebangsaan yang terus dikembangkan oleh PMII. Pemahaman tentang sejarah pembentukan bangsa dan Negara Indonesia ini sejak awal perekrutan dan pelatihan di Masa Penerimaan Anggota Baru telah ditanamkan dengan maksud agar para kader mempunyai rasa nasionalisme yang kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan.

D. Analisa Kritis Terhadap Pola Kaderisasi PMII

Sebagai sebuah organisasi yang juga dapat diklasifikasikan sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam, PMII masih jauh untuk dikatakan sempurna. Terutama dalam hal administrasi dan kedisiplinan organisasi. Hal

ini terlihat dari sangat minimnya literatur tertulis yang menginventarisir segala aktifitas keorganisasian.

Dalam penyediaan buku materi kaderisasi misalnya, PMII belum mempunyai buku materi kaderisasi yang baku sebagai pegangan para kader. Yang ada hanyalah buku- buku saku yang diberikan sebagai panduan saat pelaksanaan kaderisasi formal; MAPABA, PKD, PKL. Kurangnya buku- buku ini tentunya akan dapat berimbas pada usaha memaksimalkan proses kaderisasi. Ini semua dapat penulis rasakan saat menghimpun data- data materi kaderisasi yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini.

Dalam penggalian literatur keilmuan, PMII saat ini lebih menyukai literatur barat yang kadang kala cenderung difavoritkan. Ini semua berimbas pada pemahaman kebarat-baratan yang kemudian memperlihatkan aktifitas PMII seakan- akan keluar dari garis ajaran *Tawazun* (seimbang) yang ada dalam ajaran dan pemahaman keIslamannya. Hal ini yang melatarbelakangi dan muncul opini bahwa PMII telah keluar jauh dari pemahaman aswaja NU yang menjadi ruh keorganisasiannya.

Dari segi kurikulum juga masih dikatakan sederhana, walaupun sudah mulai terarah. Dalam prinsip pengembangan kurikulum dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas yang mengharuskan pengembangan kurikulum agar memiliki kesinambungan dengan lapangan kerja dan lapangan praktis yang ada di lapangan. Dalam prinsip ini PMII dapat dikatakan masing sangat lemah. Kurikulum kaderisasi yang ada, sejak pendiriannya sampai saat ini

masih tetap tanpa ada perubahan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kedinamisan dalam menanggapi sebuah realita perubahan zaman masih lemah. Sehingga saat ini kader PMII yang kebanyakan memang dari pemuda NU sering dilabeli dengan gerakan kaum tradisional pinggiran yang seringkali dianggap kuno dalam memberikan argumentasi terhadap permasalahan kehidupan.

Dari segi kedisiplinan dalam pelaksanaan kaderisasi formal, PMII masih dikatakan tidak disiplin. Terutama dalam pelaksanaan Pelatihan Kader Lanjut (PKL). Hampir semua cabang PMII di Indonesia lemah dalam hal ini. Yang masih berjalan dengan baik adalah MAPABA dan PKD karena memang proses ini dilakukan dalam tingkatan kepengurusan yang ada di level kampus. Pelaksanaan MAPABA dan PKD-pun masih terlihat sebagai agenda rutinan saja tanpa memperlihatkan penguatan dan pengarahan kemampuan kader dengan baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pendidikan Islam berwawasan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, dan aliran agama. Pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan manusia yang setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia dari manapun dia datang dan berbudaya apapun dia. Pendidikan ini dilaksanakan berdasarkan dan bersumberkan dengan semangat ajaran Islam yang ingin membuktikan bahwa Islam adalah agama *Rahmatan Lil Alamin*. Dalam penerapannya, aktifitas pembelajaran yang dilakukan mencoba memperlihatkan dengan bukti nyata dalam kehidupan bahwa adanya keragaman kultur itu adalah sebuah keniscayaan yang memang sengaja dibentuk oleh Allah. Untuk meyakinkan hal ini juga dilakukan dengan mengungkapkan berbagai teks-teks suci Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menerangkan tentang keragaman ini. Dengan proses semacam itu akan tampak bahwa Islam dengan pendidikan yang dilakukannya benar-benar dapat mewujudkan kehidupan yang aman, damai dalam keberagaman yang ada.

3. Nilai- nilai Pendidikan Islam berwawasan Multikultural yang ada di dalam proses kaderisasi PMII sangatlah banyak. Hal ini dapat ditemukan dalam pokok- pokok materi kaderiasasi yang dilakukannya baik materi keIslaman dan materi Keindonesiaan serta Nilai Dasar Pergerakannya. Secara pasti yang yang dapat dibaca dan ditulis nilai- nilai itu antara lain:
- a. **Tawasuth** (moderat); sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus ditengah kehidupan bersama. NU dan PMII dengan sikap sadar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatharruf* (ekstrim).
 - b. **Tasamuh** (toleran); sikap toleran terhadap perbedaan, baik dalam masalah keagamaan, terutama hal- hal yang bersifat *furuiyah* atau menjadi masalah *khilafiyah*, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Sikap tasamuh ini memberikan bekal kepada warganya agar jangan terlalu membesar- besarkan perbedaan yang terjadi di antara umat Islam dan umat non Islam.
 - c. **Tawazun** (seimbang); sikap seimbang dalam berkhidmah, menyerasikan kepada Allah SWT, juga khidmah kepada sesame manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang . *Tawazun* juga

penting untuk menjaga persatuan dan perdamaian Negara Indonesia. Walaupun wawasan multikultural ini tidak menjadi bagian tersendiri dari mata pelajaran, namun demikian hal ini tetap bisa menyampaikan nilai- nilai substansial wawasan multikultural ini dalam semua materi pelajaran.

Kedua, untuk organisasi PMII agar terus menjaga sekaligus mengembangkan pola kaderisasi yang dijelankannya. Corak keIslaman yang bernuansa lokalitas Indonesia sangat penting bagi keutuhan NKRI. Prinsip-prinsip multikultural yang diemban dalam proses kaderisasi PMII sudah cukup kuat dalam hal legitimasi membenaran dengan adanya ayat- ayat suci yang menjadi sumber ajaran Islam. Namun demikian PMII harus tetap mengadakan perbaikan atas segala kekurangan yang ada di dalamnya.

Ketiga, bagi pemerintah agar terus mendorong dan mensupport organisasi- organisasi yang memegang ajaran multikultural. Dorongan ini bisa berupa materiil ataupun immaterial.

Keempat, bagi pihak yang terkait perlu mengadakan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui implementasi praktis dari hasil penelitian dalam skripsi ini tentang konsep sistem kaderisasi yang dibangun oleh PMII.

Dan yang terakhir kepada seluruh pembaca agar terus mewacanakan kajian multikultural ini. Dengan demikian pemahaman masyarakat akan terus berkembang untuk dapat menerima adanya perbedaan- perbedaan yang ada dalam kehidupannya.

